

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 1930-an

A. Kondisi Geografis

Banyumas merupakan wilayah yang istimewa karena selain berstatus sebagai ibukota kabupaten, Banyumas juga berstatus sebagai ibukota karesidenan. Status karesidenan diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Resolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1. Wilayah Karesidenan Banyumas terdiri dari lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purwokerto.¹

Batas wilayah Karesidenan Banyumas sebelah barat adalah Provinsi Jawa Barat dengan Sungai Citanduy sebagai batas teritorialnya. Sebelah selatan dibatasi oleh pantai Samudera Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan daerah Bagelen (Kabupaten Purworejo), sebelah timur dengan Kabupaten Wonosobo, sedang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes.² Wilayah Karesidenan Banyumas terbentang di sisi barat daya Provinsi Jawa Tengah. Jawa tengah terbentuk berdasarkan *staatsblad* Tahun 1929 No. 227, wilayahnya meliputi seluruh

¹ Budiono Herusatoto, *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, Yogyakarta: LKIS, 2008, hlm. 14.

² *Ibid.*, hlm. 13.

daerah di pulau Jawa bagian tengah kecuali Kasunanan dan Mangkunegaran di Surakarta, serta Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta.³

Secara geografis, wilayah Kabupaten Banyumas terletak diantara 108° 39' 17"-109° 27' 15" BT dan 7° 15' 05"-7° 37' 10" LS. Kabupaten Banyumas memiliki luas 132.759 Ha. Wilayah Kabupaten Banyumas lebih dari 45% merupakan daerah dataran yang tersebar dibagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu udara 26,3° C. Suhu minimum sekitar 24,4° C dan suhu maksimum 30,9° C. Ketinggian wilayah di Kabupaten Banyumas sebagian besar berada pada kisaran 25-100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 M dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha.⁴

Berdasarkan kemiringan wilayahnya, Kabupaten Banyumas mempunyai empat kategori wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan kemiringan 0° -2° meliputi areal seluas 43.876,9 Ha atau 33,05% dari seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini terletak dibagian tengah dan selatan Kabupaten Banyumas.

³ Dina Dwi Kurniarini, *Epidemi di Karesidenan Banyumas Tahun 1870-1940*, Tesis Jurusan Ilmu Sejarah FIB UGM, 1999, hlm. 29.

⁴ Badan Pusat Statistik Kab. Banyumas, *Banyumas dalam Angka*, Purwokerto: Anyar Offset, 2002, hlm. 1.

2. Wilayah dengan kemiringan 2°-15° meliputi areal seluas 21.294,5 Ha atau 16,04% dari seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini terletak di sekitar Gunung Slamet.
3. Wilayah dengan kemiringan 15°-40° meliputi areal seluas 35.141,3 Ha atau seluas 26,47% dari seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Wilayah ini terletak di daerah lereng Gunung Slamet.
4. Wilayah dengan kemiringan lebih dari 40° meliputi areal seluas 32.446,3 Ha atau seluas 24,44%. Wilayah ini terletak di daerah lereng Gunung Slamet.⁵

Sebagai sebuah kabupaten, Banyumas berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah kabupaten lain. Disebelah utara, Kabupaten Banyumas berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap. Sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.

⁵ *Ibid.*

Kabupaten Banyumas juga mempunyai akses langsung dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, walaupun pada tahun 1930-an akses jalan belum sebagus saat ini. Berikut ini jarak kabupaten Banyumas dengan beberapa kota disekitarnya:

1. Ke Tegal = 114 Km
2. Ke Peralang = 144 Km
3. Ke Brebes = 127 Km
4. Ke Purbalingga = 20 Km
5. Ke Banjarnegara = 65 Km
6. Ke Kebumen = 85 Km
7. Ke Cilacap = 53 Km
8. Ke Semarang = 211 Km⁶

Wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Banyumas sendiri, merupakan wilayah yang dilalui aliran Sungai Serayu. Salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Tengah. Sungai Serayu membelah wilayah Kota Banyumas menjadi dua bagian, yaitu sebelah utara dan sebelah selatan. Dengan kondisi tersebut, pada tahun 1930an akses jalan di Kabupaten Banyumas khususnya yang melewati Sungai Serayu sangat terbatas, karena di wilayah karesidenan Banyumas hanya ada satu jembatan permanen yang terletak di sebelah utara Kota Banyumas yang dapat digunakan untuk menyeberangi Sungai Serayu. Di wilayah lain yang dilewati Sungai Serayu,

⁶ *Ibid.*

penyeberangan hanya dilakukan dengan menggunakan bantuan tambang.⁷ Oleh karena itu akses jalan dari Kota Banyumas ke kota-kota lain yang berada di sisi utara Sungai Serayu sangat terbatas.

Pemerintah kolonial Belanda merencanakan dan membangun Kota Banyumas dengan gaya arsitektur Eropa. Hal ini terlihat dari sisa-sisa bangunan pemerintah kolonial yang masih ada saat ini, pola tata ruang Kota Banyumas, serta pola jaringan jalan yang bukan merupakan pola tradisional tetapi pola grid yang tegas. Sumbu kantor bupati dan kantor karesidenan merupakan sumbu yang cukup kuat dan dominan. Pola lingkungan dengan pola papan catur menunjang formalitas Kota Banyumas.⁸ Pola tata ruang yang demikian membuat Kota Banyumas dapat dimasuki dari empat arah, yakni: arah utara dari Purwokerto, arah timur dari Banjarnegara, arah selatan dari Kebumen atau Gombong, dan arah barat dari Kebasen atau Patikraja.⁹ Pola papan catur tersebut dapat dilihat jelas dalam peta lama Kabupaten Banyumas.

Selain empat jalan utama yang menghubungkan Kota Banyumas dengan wilayah-wilayah penting lain disekitarnya, ada pula jalan yang berada

⁷ M. J. van der Pauwert, "Memori Residen Banyumas, 24 Oktober 1925 " *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977, hlm. XCIX.

⁸ *Eyang-Nardi. blogspot. com* (diakses 25 Mei 2014. Penulis blog ini adalah Ir. Sunardi, MT. Beliau merupakan seniman dan sejarawan Banyumas).

⁹ Sugeng Wijono dan Sunardi, *Banjoemas Riwajatmoe Doeloe*, Purwokerto: Daya Mandiri Production, 2006, hlm, 13.

di sebelah selatan alun-alun yang disebut jalan *bankstraat*. Di sisi sebelah utara jalan ini berdiri kantor telepon dan kantor *Algemene Volks Kredit Bank* (AVB). Di depan kantor karesidenan juga melintang jalan yang disebut *Kliniekstraat*, yang menghubungkan dengan kabupaten Banjarnegara. Di sebelah barat kantor karesidenan dibangun Rumah Sakit Juliana yang diresmikan pada 30 April 1925.¹⁰ Rumah Sakit Juliana ini sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, akantetapi saat ini telah berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

Sebagai sebuah kota yang memiliki sejarah panjang sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara, pola tata ruang pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas menunjukkan ada filosofi kuat yang menunjukkan hubungan erat antara manusia dan alam. Dimana gunung, pusat pemerintahan dan laut merupakan satu garis lurus. Gunung Slamet, pendopo kabupaten, kantor karesidenan, dan pantai selatan merupakan satu garis lurus. Pendopo kabupaten menghadap kea arah selatan di mana di sana terletak alun-alun, disebelah barat alun-alun terdapat Masjid Agung Banyumas dan Kampung Kauman.

Pemerintah kolonial membangun gedung penjara di sebelah timur, antara alun-alun dan pendopo kabupaten pemerintah kolonial membangun

¹⁰ Prima Nurahmi M, (2010), “Runtuhnya Suatu Kejayaan: Kota Banyumas 1900-1937”, dalam Sri Margana dan M. Nursam (Ed), *Kota-Kota di Jawa, Identitas, Gaya Hidup, dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, hlm. 23.

Holland-Indies School (HIS), di belakang HIS dibangun *Kazerne Politie* (tangsia polisi Belanda), di sebelah barat HIS dibangun gedung *Inlander 2e School* (Sekolah Ongko Loro).¹¹ Diantara jalan yang menghubungkan pendopo kabupaten dan kantor residen dibangun gedung *Societeit Harmonie*, gedung tempat bersosialisasi dan rekreasi bagi kalangan elit di Kota Banyumas.

Pemerintah kolonial Belanda juga membelah alun-alun di depan pendopo kabupaten, sehingga antara pendopo kabupaten di sebelah utara dengan kantor residen di sebelah selatan benar-benar terhubung oleh satu jalan lurus. Hal ini memudahkan residen dalam mengawasi bupati. Sebagian orang berpendapat bahwa, dengan dibelahnya alun-alun dan dibangunnya berbagai bangunan oleh pemerintah kolonial Belanda disekitar pendopo kabupaten bertujuan untuk mengurangi kewibawaan pemerintahan kabupaten. Terutama dengan adanya jalan tengah yang membelah alun-alun dan menghubungkan langsung pendopo kabupaten dengan kantor karesidenan. Karena dengan adanya jalan tengah tersebut membuat pendopo kabupaten menjadi berada pada posisi *sunduk sate* dan masyarakat Banyumas memiliki kepercayaan bahwa rumah atau bangunan yang berada pada posisi *sunduk sate* maka akan mengalami kesialan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 22.

B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Perekonomian Masyarakat

Karesidenan Banyumas merupakan daerah pertanian yang makmur, kecuali Kabupaten Banjarnegara.¹² Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya Sungai Serayu yang mengalir, membelah wilayah Karesidenan Banyumas. Sehingga sepanjang aliran Sungai Serayu menjadi lahan yang sangat subur bagi pertanian masyarakat setempat. Faktor lain yang membuat tanah di wilayah Karesidenan Banyumas subur adalah adanya Gunung Slamet. Proses alam yang terjadi di Gunung Slamet memberikan dampak yang baik terhadap pertanian di wilayah Karesidenan Banyumas.

Karakteristik wilayah Kabupaten Banyumas yang subur serta iklim yang bagus, membuat masyarakat di Banyumas sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi mereka. Lahan perkebunan masyarakat banyak di tanami, tanaman-tanaman pertanian, khususnya komoditi pertanian yang banyak menguntungkan pemerintah kolonial Belanda, seperti padi, tebu, kopi, indigo, kelapa, serta tembakau. Hasil panen pertanian tersebut pada umumnya dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat pribumi yang dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan dari hasil pertanian tersebut.

¹² J. J Helsdingen, "Memori Residen Banyumas, 14 Mei 1928 " *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Tengah)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1977, hlm. CII.

Di Karesidenan Banyumas terdapat lima pabrik gula yang luar biasa besar artinya bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Pabrik gula tersebut terletak di:

1. Purwokerto, luas areal tanaman tebunya 1.800 bau,
2. Kalibagor, luas areal tanaman tebunya 2.240 bau,
3. Klampok, luas areal tanaman tebunya 3.425 bau, yang 3.000 bau di Banyumas
4. Bojong, luas areal tanaman tebunya 2.600 bau,
5. Kalirejo (Sumpiuh), luas areal tanaman tebunya 2.000 bau, yang 200 bau di karesidenan Kedu.¹³

Dengan adanya pabrik-pabrik gula tersebut, kehidupan ekonomi masyarakat di Karesidenan Banyumas menjadi sedikit lebih terangkat. Bukan hanya para petani saja yang mendapatkan keuntungan para pelaku bisnis orang Belanda, rakyat kecil yang tidak memiliki sawah pun bisa hidup dengan jalan bekerja sebagai buruh tembakau atau tebu. Masyarakat pribumi yang mempunyai lahan yang luas biasanya menyewakan lahan perkebunannya tersebut kepada pengusaha-pengusaha Belanda.

Kegiatan perekonomian masyarakat melalui perdagangan pada tahun 1930-an juga sudah beragam. Selain Perdagangan berupa hasil bumi, barang dagangan lain yang diperjual-belikan adalah hasil barang galian, terutama kapur untuk bangunan, kemudian pawon dari batu (tungku untuk memasak). *Ciri, uleg-uleg, lumpang*, serta ubin sebagai lantai rumah beserta umpak (batu penyangga tiang rumah). Usaha kerajinan bambu sangat besar, berwujud

¹³ J.J. Helsdingen, *op, cit.*, hlm. CIII.

keranjang untuk mengangkat kapur, *tabag* (anyaman bambu untuk dinding dan langit-langit rumah), serta bambu untuk pagar pekarangan yang disebut *glatak* (pagar yang terbuat dari bambu).¹⁴

Masyarakat saat itu sudah menggunakan mata uang sebagai pembayaran yang sah. Pertama-tama keluar mata uang logam yang disebut uang gobog bentuknya persegi empat terbuat dari logam tembaga. Peredaran uang ini berakhir kira-kira tahun 1900. Kemudian keluar uang pengganti berupa uang logam untuk pecaaan sen sampai gulden yang berhuruf sama dengan rupiah. Uang diatas f.1,00 berupa kertas bergambar ratu Belanda dan pada setiap sudutnya tertera nominal setiap lembarnya. Warnanya coklat, putih kekuning-kuningan dan warna biru cerah.¹⁵ Uang-uang tersebut sudah lazim digunakan dalam transaksi jual beli pada saat itu.

Uang pecahan yang dikenal uang receh terdiri dari uang logam kepingan. Dibuat dari bahan logam tembaga dan perak yang campuran timah putih nilainya dari yang paling rendah 0,5 sen disebut juga serini, 1 sen, 2.5sen disebut juga sebenggol. Uang semacam ini dibuat dari tembaga yang dicampur dengan besi. Nilai 5 sen biasa disebut juga sekelip, 10 sen disebut

¹⁴ Kaswadi Harjosewoyo, *Patikraja Sedjarahmu Tempoe Doeloe hingga era Reformasi*, Banyumas: tanpa keterangan penerbit, 2010, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

sekethip, 2.5 sen disebut setali dan 50 sen dibuat dari alumunium dicampur dengan besi putih.¹⁶

Baik talen maupun bagong banyak dimiliki oleh petani sebagai kebanggaan, menunjukkan bahwa yang mempunyai banyak uang emas menandakan orang kaya. Apalagi jika talen dan bagong dibuat hiasan emas sebagai tusuk sanggul (cunduk mentul) atau bros semaacam hiasan kancing baju dirangkai dgn untaian emas yg dipasang pada baju kebaya sejak dari leher sampai pusat.¹⁷ Pada umumnya hanya golongan priyayi saja yang dapat mempunyai uang sebanyak itu.

Transaksi dalam perdagangan saat itu sedikit berbeda dengan transaksi perdagaan saat ini. Salah satu perbedaanya adalah pada satuan hitung barang dagangannya. Dulu ukuran jual tidak menggunakan kiloan, tetapi menggunakan satuan hitung yang lazim disebut onggon (seonggok=seumbuk). Satuan hitung ini berlaku untuk barang-barang dagangan berupa sayur-sayuran seperti kentang, cabai, atau kacang dan kedelai.

Masyarakat di sekitar wilayah Kabupaten Banyumas juga sudah ada yang memproduksi minyak goreng sendiri, walaupun masih dengan tradisional. Cara pembuatan minyak goreng tersebut masih sangat sederhana dan menggunakan peralatan seadanya. Cara pembuatannya yang pertama

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

adalah parudan kelapa dikukus, kemudia ditutup beberapa hari sampai lembek. Setelah itu di diamkan dan dijemur hingga akhirnya diperas sampai keluar minyaknya. Cara pemasaran minyak ini tidak menggunakan ukuran liter dan kiloan tetapi menggunakan ukuran botol yang disebut cengkli dan sopi berupa botol persegi seperti botol minuman keras. Untuk penjualan eceran menggunakan canthing. Sedangkan penjualan yang cukup banyak menggunakan botol yang disebut cengkli dan sopi.

Selain berdagang dengan cara membawa barang dagangannya ke pasar, ada juga penduduk pribumi serta beberapa orang Cina yang berdagang dengan cara berkeliling. Mereka berkeliling ke pelosok-pelosok desa terutama desa yang jauh dari pasar. Barang dagangan dibawa dengan cara dipikul. Barang yang dijual adalah kebutuhan harian seperti; garam dapur, ikan asin, minyak, dan kemenyan. Barang-barang dagangan yang dijual kebanyakan sudah dikemas kecil-kecil dengan bungkus kertas, yang disebut dengan kata “racikan” yang artinya sudah diracik atau sudah dipersiapkan dengan praktis. Dengan model dagangan seperti itu maka di kalangan masyarakat Banyumas pedagang Cina atau Tionghoa disebut Cina *Craki*.

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan cara tunai atau kredit dengan uang pertama semampu si pembeli. Menagihnya menggunakan pasaran, misal setiap hari manis, Pahing, Pon, Wage atau Kliwon sesuai jatah waktu Cina Craki datang ke desa pembeli. Bila menagih disebut mendreng,

maka timbul istilah untuk sebutan seorang penagih utang yang cerewet seperti Cina *mendreng*.¹⁸

2. Struktur Masyarakat

Seperti umumnya daerah-daerah lain di Indonesia, pada masa pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Banyumas terdapat pembagian kelompok-kelompok sosial masyarakat. Pembagian kelompok sosial ini sengaja dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai legitimasi kekuasaan serta menguatkan posisi mereka sebagai kelompok paling berkuasa di wilayah Indonesia. Adapun pembagian kelompok tersebut adalah; kelompok orang Eropa, kelompok orang Cina, kelompok orang Timur Asing, dan kelompok orang Pribumi. Berikut ini tabel jumlah penduduk Karesidenan Banyumas serta karesidenan-karesidenan lain di Jawa Tengah berdasarkan perhitungan jumlah penduduk bulan Oktober tahun 1930:

Tabel. I
Jumlah Penduduk Karesidenan-karesidenan
di Jawa Tengah tahun 1930

Karesidenan	Eropa	Pribumi	Cina	Timur Asing	Jumlah
Banjoemas	2.994	2.453.334	17.615	504	2.474.447
Pekalongan	4.269	2.603.766	25.714	6.375	2.640.124
Kedoe	6.563	2.101.745	21.026	560	2.129.334
Semarang	17.965	1.950.021	40.651	2.979	2.011.616
Djepara-Rembang	2.835	1.856.714	25.354	654	1.885.548

SUMBER: Statistische gegevens betreffende Indonesie, W. Van Gelder en C.Lekkerker, Schoolatlas van Indonesia en P.R Bos en C.T van Balen, Kleine Schoolatlas der Gehele Aarde voor de Scholen in Indonesie

¹⁸ *Ibid.*

(Bewerkt door P. Eibergem), Groningen, Batavia: J.B Wolters Uitgeversmaatschappij n.v, 1948.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk pribumi di Karesidenan Banyumas jauh lebih banyak dari jumlah penduduk lainnya, namun demikian dalam hal status sosial penduduk pribumi menduduki kelas paling bawah, di bawah kelompok orang Eropa, kelompok Cina dan kelompok Timur Asing. Politik pengelompokan masyarakat berdasarkan suku dan ras yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda berlaku pula dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi di wilayah Banyumas Pemerintah kolonial Belanda membentuk pola yang sangat jelas terlihat bahwa orang-orang pribumi dikelompokkan untuk menjadi buruh tani atau penggarap lahan, orang-orang Cina dan Timur Asing menjadi pedagang atau bisnis jasa, dan orang-orang Eropa menjadi pegawai pemerintahan atau bangsawan. Walaupun ada sebagian rakyat pribumi yang berdagang akan tetapi hanya sebagai pedagang kecil yang lebih banyak menjual barang-barang yang sederhana.

Selain pengelompokan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, dalam interaksi sehari-hari masyarakat Banyumas juga menggolongkan masyarakat menjadi empat golongan yaitu:

1. Golongan Amtenar atau pegawai Belanda biasa disebut Priyayi. Bila menyebut namanya menggunakan istilah Ndoro,
2. Golongan Pamong desa termasuk juga disebut priyayi, dengan panggilan kebiasaan Kiyai, misalnya Kiyai Lurah, Kiyai Penatus dsb,

3. Golongan petani disebut Kuli, karena mempunyai pekulen (garapan sawah) bagi mereka yang sanggup dan mampu membayar sawah. Golongan kuli ini yang mempunyai hak suara pada rembug desa, serta kewajiban kerigan (kerja bakti) saluran irigasi dan jalan desa,
4. Golongan yang tidak punya disebut rempo, yaitu tingkatan masyarakat paling bawah, kewajibannya kerja bakti atau gugur gunung.¹⁹

Masyarakat Kota Banyumas banyak bermukim di utara kota, yakni di Desa Pekunden. Desa ini berada di sisi selatan Sungai Serayu. Selain Pekunden, desa lain yang juga memiliki jumlah penduduk cukup banyak adalah Desa Kedunguter dan Desa Sudagaran.²⁰ Desa-desa tersebut merupakan desa yang mempunyai akses langsung dengan wilayah Kota Banyumas.

Masyarakat desa di Kabupaten Banyumas pada sekitar tahun 1930-an umumnya masih hidup miskin. Kebanyakan rumah tinggal penduduk masih sangat sederhana. Rumah-rumah penduduk mayoritas terbuat dari kayu dan bambu. Kayu sebagai tiang dan dinding terbuat dari anyaman bambu. Lantainya masih tanah biasa bagi yang tidak mampu. Bagi masyarakat yang mampu, maka tepian lantai rumahnya menggunakan batu pada.²¹ Dengan

¹⁹ Kaswadi Harjosewoyo, *op. cit.*, hlm. 5.

²⁰ Prima Nurahmi M, *op. cit.*, hlm 24.

²¹ *Ibid.*, hlm. 3.

kondisi bangunan rumah yang masih sangat sederhana maka keamanan rumah pada saat itu sangat rentan.

3. Perkembangan Infrastruktur

Melalui *staatsblad* (lembaran Negara Hindia Belanda) tahun 1929 No.242 yang dikeluarkan pada 17 Juli 1929 tentang petunjuk Kabupaten Banyumas menjadi kota mandiri, pemerintah kolonial Belanda juga telah memberikan kewenangan kepada pemerintaahan kabupaten untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur-infrastruktur kota.²² Bupati Banyumas diberi kekuasaan dalam wilayahnya untuk melakukan pengelolaan terhadap jalan-jalan umum, penerangan jalan, berbagai lapangan dan taman umum, tempat pemotongan umum, tempat pemakaman umum, pasar, dan kantor dinas. Pengelolaan terhadap infrastruktur-infrastruktur tersebut dilakukan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Sebagai sebuah ibukota karesidenan sekaligus ibukota kabupaten, perkembangan infrastruktur di Kota Banyumas cukup baik. Terlepas dari kondisi geografis Kota Banyumas yang cukup sulit karena dikelilingi pegunungan dan dibatasi oleh Sungai Serayu. Pemerintah kolonial Belanda telah banyak berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur

²² Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *Staatsblad* tahun 1929 no. 242. *tentang Pembentukan Pemerintahan, Desentralisasi Kabupaten-Kabupaten Jawa Tengah, Petunjuk Kabupaten Banyumas menjadi Kota Mandiri*, Batavia: 1929.

di Kota Banyumas. Baik bangunan-bangunan fisik berupa gedung-gedung pemerintahan dan sekolah maupun bangunan jaringan transportasi.

Jaringan transportasi menjadi sektor yang paling berpengaruh bagi perkembangan Kota Banyumas. Sebagaimana diungkapkan oleh Residen Banyumas M.J. van der Pauwert dalam Memori Serah Jabatannya tahun 1925 sebagai berikut:

Karesidenan Banyumas, selain dilewati jalan kereta api, juga dilewati jalan utama, yaitu:

1. Di barat laut, jalan Tegal-Prupuk-Bumiayu-Purwokerto-Banyumas,
2. Di timur sebelah utara, jalan Banyumas-Wonosobo melintas pas Kledung (1390 m) hingga ke Magelang-Yogyakarta,
3. Di timur laut sebelah selatan, jalan Banyumas-Sumpiuh-Kebumen-Purworejo lewat Mergoyoso terus ke Magelang dan Yogyakarta.

Jalan yang kedua dan ketiga tersebut sama sekali belum menguntungkan bagi lalu lintas secara normal ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalan bagi Karesidenan Banyumas sebenarnya merupakan soal mati-hidupnya daerah itu, sehingga perlu mendapat perhatian khusus.

Menurut rencana akan dibangun jalan antara Banyumas dan Priangan lewat Wangon-Lumbir-Majenang-Banjar. Tanpa jalan kereta api Karesidenan Banyumas:

1. Tidak mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dari Banyumas ke Bandung orang harus lewat Purwokerto-Bumiayu-Prupuk-Cirebon-Sumedang. Jalan ini melingkar sepanjang 300 Km,
2. Tidak mempunyai hubungan yang langsung dan pendek dengan pantai utara,
3. Hubungan dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur sukar.²³

Selain jaringan jalan yang ada di wilayah Karesidenan Banyumas, di Kota Banyumas sendiri pemerintah kolonial Belanda membangun jalan-jalan utama yang ada di pusat Kota Banyumas, diantaranya adalah *Djalan Tengah*,

²³ M. J. van der Pauwert, *op. cit.*, hlm. XCVIII.

Bankstraat, Residentweg, Kliniekstraat, serta Krijgmanstraat. Djalan Tengah membujur ke utara ke arah jembatan Sungai Serayu yang dibangun pada tahun 1891. Jembatan ini saat itu menjadi satu-satunya jembatan permanen yang membelah Sungai Serayu yang ada di Karesidenan Banyumas. Jembatan ini menghubungkan Kota Banyumas dengan distrik Sokaraja. Pada jalan tengah terdapat beberapa bangunan antara lain hotel Carolina serta pasar Banyumas yang terletak di selatan jembatan Sungai Serayu.²⁴

Jalur kereta api maupun jalur trem hingga saat ini tidak pernah dibangun di Kota Banyumas. Perusahaan kereta api Pemerintah Kolonial Belanda *Serajoedal Stoomtran Maatshappij* (S.D.S) pernah diminta untuk membangun jalur trem yang melewati Kota Banyumas, akan tetapi S.D.S tidak bersedia melanjutkan pembangunan trem tersebut sampai kota Banyumas, karena dianggap tidak menguntungkan.²⁵ Kondisi geografis Kota Banyumas yang dikelilingi bukit-bukit dianggap menyulitkan, dan tidak akan menghasilkan keuntungan.

Pembangunan jaringan transportasi di Karesidenan Banyumas pada umumnya sudah mulai dilakukan sejak pertengahan abad ke-19. Terlebih sejak dibangunnya pabrik-pabrik gula di Klampok, Bojong, Kalimanah,

²⁴ Prima Nurahmi M, *op, cit.*, hlm. 22.

²⁵ M. J. van der Pauwert, *op, cit.*, hlm. C

Sokaraja, dan Purwokerto.²⁶ Dengan adanya pabrik-pabrik gula tersebut, pembangunan sarana irigasi dan jalur transportasi di wilayah Karesidenan Banyumas berkembang dengan pesat. Setiap pabrik gula yang ada pasti akan di bangun trem yang digunakan sebagai jalan untuk mengangkut tebu-tebu dari perkebunan ke pabrik. Demikian pula dengan saluran irigasi, untuk mengairi perkebunan-perkebunan di wilayah Karesidenan Banyumas, khususnya perkebunan tebu dan padi, pemerintah kolonial Belanda telah membangun saluran-saluran irigasi di setiap areal perkebunan.

Pemerintah kolonial Belanda telah mengatur sistem pembagian air yang dialirkan ke setiap lahan perkebunan. Sebagai imbalan mendapat ijin untuk memperluas atau mengubah areal penanaman tebu pabrik-pabrik gula yang bersangkutan diwajibkan memberi sumbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menggaji petugas-petugas pengairan. Petugas ini akan mengatur dan mengawasi pembagian air beserta perlengkapan-perengkapannya. Menurut keputusan residen tertanggal 12 Mei 1928 No. 3/19 ditetapkan bahwa pabrik-pabrik gula itu harus memberi sumbangan kepada pemerintah sebesar f 11.400.²⁷

Selain petugas pengairan di lingkungan perkebunan dan pabrik gula, ada pula petugas yang dinamakan *ulu-ulu* lingkungan. *Ulu-ulu* lingkungan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ J. J. Helsdingen, *op, cit.*, hlm. CIV.

merupakan petugas yang disertai wewenang untuk mengatur air setempat. Di setiap desa secara berangsur-angsur akan diangkat seorang *ulu-ulu*. *Ulu-ulu* ini dipilih dan digaji oleh desa. Keputusan tentang pengangkatan *ulu-ulu* ini telah ditetapkan oleh Residen dengan keputusan Residen tertanggal 22 Oktober 1926 No. 20/19.²⁸

Pemerintah Kolonial Belanda juga telah membuat aturan tentang biaya pemeliharaan bangunan pengairan desa. Seperempat biaya pemeliharaan bangunan pengairan desa yang dikeluarkan setiap tahun dipikul oleh pabrik gula yang bersangkutan. Dana bantuan dari pabrik gula ini harus disetorkan di Bank Rakyat Purwokerto. Setelah ada bangunan-bangunan pengairan yang baik, pembagian air dapat diatur secara ekonomis sehingga kebiasaan pembagian air siang dan malam hari dapat dihapus.

Perkembangan infrastruktur lain yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas antara lain adalah infrastruktur pendidikan. Hingga tahun 1933 di Kabupaten Banyumas terdapat 194 *desa scholen*, 13 *Inlander 2e Scholen*, 17 *Vervolgscholen*, 1 *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)*, 2 *HCS*, 1 *Europeesche Lagere School (ELS)*, dan 1 *Schakel School*.²⁹ Secara umum perkembangan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Banyumas sudah cukup baik, akan tetapi jenjang pendidikan tertinggi yang ada pada saat

²⁸ *Ibid.*

²⁹ W. Ch. Adrians, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1933*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

itu di Karesidenan Banyumas adalah *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang terletak di Kota Purwokerto, sehingga bagi masyarakat Kabupaten Banyumas yang ingin melanjutkan pendidikan dari tingkat dasar menuju jenjang yang lebih tinggi yaitu MULO, mereka harus pergi ke Kota Purwokerto.

4. Kondisi Pemerintahan

Tahun 1922 pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan Undang-Undang Penyesuaian (*Bestuurhervormingwet*), yaitu suatu Undang-Undang yang dimaksudkan untuk menyesuaikan pemerintahan wilayah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Desentralisasi (*Desentralisatiewet*) tahun 1903 dan keputusan Desentralisasi (*Desentralisatie Besluit*) tahun 1905. Dengan Undang-Undang Desentralisasi dibentuklah Dewan Lokal yang memiliki otonomi.³⁰ Dengan adanya Dewan Lokal maka pemerintahan lokal perlu dibentuk dan disesuaikan.

Pemerintah Kolonial Belanda kemudian membagi wilayah Jawa menjadi tiga provinsi (*Province*), yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Setiap provinsi tersebut dipimpin oleh seorang Gubernur. Dalam setiap provinsi tersebut kemudian dibentuk karesidenan (*Afdeling*) yang dipimpin oleh seorang Residen. Seorang residen

³⁰ A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*, Yogyakarta: Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2001, hlm.102.

mempunyai tugas untuk memimpin dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah karesidenan, terutama dalam memelihara keamanan dan ketertiban.³¹ Seorang residen, dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh pejabat-pejabat dibawahnya, seperti Asisten Residen, *Controleur*, termasuk juga Bupati.

Pembentukan wilayah Banyumas menjadi sebuah ibukota karesidenan dan kabupaten, secara otomatis membuat pemerintah kolonial Belanda melakukan perombakan-perombakan yang cukup besar dalam struktur pemerintahan. Jabatan tertinggi di wilayah karesidenan adalah residen, yang merupakan seseorang berbangsa Belanda yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Jenderal. Dalam lingkup kerja di kantor karesidenan, residen bekerja dengan dibantu oleh asisten-asistennya yang umumnya merupakan orang berbangsa Belanda.

Kedudukan pemerintahan lokal berada dibawah pemerintah kolonial. Bupati bekerja dan bertanggung jawab terhadap residen. Para pegawai pemerintahan pribumi saat itu disebut Pangreh Praja. Hiraaki Pangreh Praja pada akhir abad-19 terdiri atas dasar poros bupati-patih-wedana asisten wedana; berbagai kepangkatan pada akhir abad itu sebagian besar telah dihapuskan. Pada abad 19 itu terdapat lebih banyak deretan jabatan mantri. Misalnya mantri garam, mantri candu, mantri pengairan, mantri pencatatan

³¹ *Ibid.*

tanah, mantri kopi, mantri cacar, mantri tebu, dan mantri kayu.³² Semua mantri ini dalam menjalankan tugasnya menjadi asisten dari wedono.

Menjelang tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang tertulis dalam *staatsblad* tahun 1929 nomor 242 tentang pembentukan pemerintahan, desentralisasi kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah khususnya. Petunjuk Kabupaten Banyumas menjadi kota mandiri. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1930. Melalui peraturan tersebut, dalam pasal 1 peraturan Hindia Belanda Kabupaten Banyumas ditunjuk sebagai kota mandiri. Dengan pembentukan kota mandiri tersebut, maka kemudian dibentuklah Dewan Kota yang diketuai oleh Bupati dan beranggotakan 19 orang. Anggota yang berjumlah 19 orang tersebut rinciannya adalah 3 orang warga Belanda, 14 orang warga pribumi bukan Belanda, dan 2 orang warga bukan pribumi bukan Belanda. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa anggota yang 14 orang warga pribumi bukan Belanda, 10 orang diantaranya merupakan orang-orang yang dipilih. Dengan perincian 2 orang dari distrik Banyumas, 3 orang dari distrik Sokaraja, 3 orang dari distrik Purworejo, dan 2 orang dari distrik Sumpiuh.³³ Dewan kota ini bertugas melakukan pengelolaan pemerintahan kota serta memberikan

³² Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hlm. 67.

³³ Gubernur Jenderal Hindia Belanda, *staatsblad*, tahun 1929 no. 242., *Pembentukan Pemerintahan Desentralisasi Kabupaten-kabupaten Jawa Tengah, Petunjuk Kabupaten Banyumas Menjadi Kota Mandiri*, Batavia: 17 Juli 1929.

masukan dan pertimbangan terhadap pemerintah kolonial ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan.

Pada dasawarsa tahun 1930-an Kabupaten Banyumas mengalami satu kali pergantian Bupati. Bupati Banyumas Kanjeng Pangeran Adipati Aria (K.P.A.A) Gandasoebrata, merupakan Bupati Banyumas yang memerintah pada tahun 1913-1933. Pada bulan Januari 1933 K.P.A.A Gandasoebrata digantikan oleh putranya yaitu Raden Adipati Aria (R.A.A) Soedjiman Gandasoebrata yang menjadi Bupati Banyumas dari tahun 1933-1950. Pada masa pemerintahan R.A.A Soedjiman Gandasoebrata inilah terjadi peristiwa perpindahan pusat pemerintahan dari Banyumas ke Purwokerto.

Wilayah pemerintahan Karesidenan Banyumas pada sekitar tahun 1930-an mengalami beberapa perubahan. Hal ini diakibatkan kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, terutama untuk merespon kondisi ekonomi yang pada saat itu mengalami krisis yang luar biasa. Krisis ekonomi global yang mengakibatkan bangkrutnya keuangan pemerintah kolonial. Bahkan di wilayah Karesidenan Banyumas, beberapa pabrik gula mengalami kebangkrutan, dan terpaksa harus ditutup. Dengan kondisi tersebut pemerintah kolonial Belanda berusaha melakukan penghematan dalam pengeluaran kas negara. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan melakukan penyusutan jumlah daerah-daerah pemerintahan. Baik itu daerah setingkat kecamatan maupun kabupaten. Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan penghapusan atau penggabungan wilayah-wilayah tersebut.

Pemerintah kolonial Belanda kemudian mengeluarkan peraturan yang tertulis dalam *staatsblad* tahun 1934 nomor 682 yang menjelaskan keputusan Gubernur nomor 22 tanggal 13 Desember 1934. Dalam *staatsblad* tersebut dijelaskan bahwa pemerintah diharuskan melakukan penghematan, sehingga kemudian mulai tanggal 1 Januari 1935 dilakukan perubahan pembagian wilayah administrasi di Karesidenan Banyumas.³⁴ Wilayah Kabupaten Banyumas, yang didalamnya terdapat distrik Banyumas kemudian digabung dengan wilayah distrik Sokaraja. Sebagai akibat dari penggabungan tersebut maka kemudian status kecamatan Somagede dan kecamatan Kalibagor dihapuskan, dan muncul distrik baru yaitu distrik Sumpiuh.

Selanjutnya melalui *staatblad* tahun 1935 nomor 632 dituliskan keputusan Gubernur tanggal 31 Desember tahun 1935 tentang penghapusan wilayah Kabupaten Purwokerto. Dengan dihapuskannya status Kabupaten Purwokerto, maka kemudian wilayah Kabupaten Purwokerto berada dibawah naungan Kabupaten Banyumas, kecuali wilayah kecamatan Purworejo yang kemudian masuk kedalam wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dengan digabungnya Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto, maka kemudian dibentuk Dewan Kabupaten baru. Dewan Kabupaten tersebut terdiri dari Bupati sebagai ketua beranggotakan 35 orang. Dari 35 orang anggota tersebut dapat dirinci 7 orang merupakan warga Belanda, 24 orang warga pribumi bukan Belanda, dan 4 orang warga bukan pribumi bukan Belanda.

³⁴ W. Ch. Adrians, *loc. cit.*

Berdasarkan keputusan Pemerintah Kolonial Belanda, mulai 1 Januari 1936 wilayah Karesidenan Banyumas menjadi hanya terdiri dari empat kabupaten saja, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Adapun wilayah pemerintahan Kabupaten Banyumas berdasarkan keputusan Pemerintah Kolonial Belanda yang tertuang dalam *staatsblad* 1937 No. 343 dan mulai berlaku pada 1 Juni 1937 adalah sebagai berikut:³⁵

Tabel. II
Wilayah Administrasi Kabupaten Banyumas tahun 1937.

Distrik	Onderdistrik
Banyumas	Banyumas
	Sokaraja
	Kebasen
	Patikraja
Sumpiuh	Sumpiuh
	Kemranjen
	Tambak
Purwokerto	Purwokerto
	Kebumen
	Kembaran
	Subang

Sumber: Memorie van Overgave Residen van Banjoemas, microfilm seri 2e reel 6, ANRI.

³⁵ H.G.F. van Huls, *Memorie van Overgave Residen van Banjoemas 1936*, microfilm seri 2e reel 6, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

